



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, perlu disusun Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
7. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
8. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
9. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
11. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
12. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.

14. Sangat rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Tingkat Klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah pengelompokan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Semarang mencakup:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal; dan
- c. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis keamanan arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi:
 1. biasa/terbuka;
 2. terbatas; dan
 3. rahasia dan sangat rahasia.
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
- d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Sarana klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka, dan brangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (4) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.

- (5) Sistem Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
- a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
 - f. 500 Perdagangan;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian; dan
 - j. 900 Keuangan.
- (6) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis disusun dalam daftar arsip dinamis dan diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pengaturan akses arsip digunakan oleh pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
- a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 2. pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan jabatan lain yang setara mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan

3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan jabatan lain yang setara mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa/terbuka, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.

- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2022

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 32

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES
 ARSIP DINAMIS

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN UMUM PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang, meliputi : a. garuda b. bendera kebangsaan c. daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) d. bandir/umbul-umbul	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Humas dan Protokol, Bagian TU, Bagian Perlengkapan, Bagian Rumah Tangga pada Asisten Administrasi Umum.
	002	Tanda kehormatan/penghargaan diberikan kepada non pns				
	003	Hari Raya/besar, meliputi : a. nasional (17 Agustus, hari pahlawan, dsb) b. keagamaan c. hari ulang tahun				
	004	Ucapan, meliputi: a. terima kasih b. selamat c. mohon diri d. bela sungkawa, dan lainnya				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	005	Undangan (laporan kegiatan pembuatan undangan beserta distribusinya)				
	006	Tanda jabatan (Pamong praja dan pejabat lainnya)				
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung kantor termasuk instalasi (listrik, telepon, otomasi/internet, air minum, hidrant, alarm, drainage)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Humas dan Protokol, Bagian TU, Bagian Perlengkapan, Bagian Rumah Tangga pada Asisten Administrasi Umum
	012	Rumah dinas termasuk tanah untuk rumah dinas, perabotan				
	013	Persinggahan termasuk mess, wisma, hotel, persinggahan				
	014	Akomodasi				
	015	Penerangan listrik				
	016	Telepon				
	017	Kemanan / Tata tertib kantor				
	018	Kebersihan kantor				
	019	Protokol termasuk upacara bendera, tata tempat, audiensi, alamat kantor dan pejabat, penerimaan tamu, kerjasama, bandir / umbul-umbul				
3	020	PERALATAN				
		Penawaran termasuk alat tulis kantor, mesin knator (manual/elektronik)	Biasa/Terbuka			1. Sekretariat/Bagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		barang dan jasa, meliputi : a. penawaran (barang, jasa) b. penawaran barang (bergerak, tidak bergerak) c. pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, prakualifikasi, evaluasi, penunjukan lelang d. spk, kontrak/amandemen/addendum, teguran e. surat perintah mulai kerja f. serah terima pekerjaan g. pemeriksaan pekerjaan h. perpanjangan waktu i. denda j. sanggahan k. pemeliharaan barang/jasa l. inventaris termasuk pendataan, pemeliharaan, penghapusan barang milik negara				2. Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 3. Bagian Humas dan Protokol, Bagian TU, Bagian Perlengkapan, Bagian Rumah Tangga pada Asisten Administrasi Umum 4. Bagian Administrasi Pembangunan pada Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat .
	020	m. ULP barang dan jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas seRumah Tanggaa	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Humas dan Protokol , Bagian TU, Bagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				penegak hukum		Perlengkapan, Bagian Rumah Tangga pada Asisten Administrasi Umum
	020	n. usulan tentang pengadaan barang pakai habis beserta distribusi dan pelaporannya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Humas dan Protokol , Bagian TU, Bagian Perlengkapan, Bagian Rumah Tangga pada Asisten Administrasi Umum 3. Bagian Administrasi Pembangunan pada Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Kesejahteraan Rakyat
3	030	KEKAYAAN DAERAH				
	030	kekayaan daerah, meliputi : a. barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak) b. barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll) c. barang persediaan dalam gudang d. alat pengangkut (laut, darat, udara) e. peralatan pabrik, laboratorium f. peralatan kesehatan/medis(runah sakit, balai pengobatan) g. usulan penambahan aset daerah,barang bergerak maupun tidak bergerak. h. permintaan perbaikan, perawatan barang inventaris beserta pelaporannya i. penghapusan aset-aset barang milik daerah j. usulan kebutuhan barang/jasa pendukung operasional kegiatan rumah tangga dinas, rumah dinas walikota, wakil walikota, rumah tanggasekda beserta pelaporannya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas seRumah Tangga penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penegak hukum	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Humas dan Protokol , Bagian TU, Bagian Perlengkapan, Bagian Rumah Tangga pada Asisten Administrasi Umum; 3. Bidang Akuntansi, Bidang Aset Daerah Pada BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	030	k. peminjaman sarana/prasarana, gedung kantor/ barang inventaris, aset bergerak maupun tidak bergerak 1. tata cara, prosedur pengamanan dan ketertiban asset-asset barang milik daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU dan Bagian Humas dan Protokol pada Asisten Administrasi Umum; 3. Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah pada BPKAD
4	040	PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI				
	040	Kebijakan pemerintah pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan dan pengawas seRumah Tangga penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	041	Akuisisi, pengolahan dan penyimpanan bahan perpustakaan Pelestarian bahan perpustakaan Pengolahan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam Penyusunan Bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder Transliterasi, translasi Survey kondisi bahan perpustakaan Perawatan, pemeliharaan, pengawetan bahan perpustakaan dan alih media bahan perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	041	Pengembangan bahan perpustakaan Pembinaan perpustakaan Pengembangan dan kerjasama perpustakaan Pembudayaan gemar membaca Penerapan, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perpustakaan Bimbingan Teknis perpustakaan dan kepastakawanan, Penilaian Angka Kredit Pustakawan Pemasarakatan bidang perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	045	Pembinaan dan pengembangan Kearsipan Bimbingan Teknis Kearsipan Pemantauan, supervisi dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	Bidang Otomasi, Pengembangan dan Kerjasama Kearsipan pada Dinas Kearsipan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, Ormas/Orpol dan masyarakat Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria arsip Pengembangan kelembagaan, Sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem kearsipan Penyusunan kajian bidang kearsipan, pengembangan laboratorium sistem kearsipan Audit kearsipan, evaluasi dan Penilaian hasil pengawasan kearsipan		yang mempunyai hak akses.	Daerah	Dan Perpustakaan
	045	Akuisisi arsip Penilaian dan verifikasi arsip yang akan disusutkan Koordinasi dan konsultasi akuisisi arsip Penerimaan, Pemindahan dan penyerahan arsip Penelusuran dan wawancara secara lisan Penyelamatan arsip vital daerah Pengolahan fisik arsip dan informasi arsip Penyusunan indeks, guide, daftar dan inventaris arsip Transkripsi rekaman suara	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penyusunan arsip citra daerah Pelestarian dalam bentuk penyelamatan, pemeliharaan dan perlindungan arsip Alih Media dan Reproduksi arsip statis Pengujian kualitas media arsip dan sarana kearsipan Restorasi dan registrasi arsip Autentikasi arsip statis				
	045	Penelusuran sumber dan wisata arsip Penyajian informasi arsip dan penerbitan naskah sumber arsip Penyusunan tayangan naskah sumber arsip Pengolahan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Penghimpunan dan penyajian data dan informasi kearsipan Pameran, publikasi dan pemasyarakatan kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	040	Laporan kegiatan operasional Perawatan aset-aset Arsip Rumah Tanggabeserta pengamanannya .	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; Bagian Humas dan Protokol pada Asisten Administrasi Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				penegak hukum		
	046	SANDI 1. pengamanan persandian dan informasi 2. tata kelola persandian 3. pembinaan, peningkatan kesadaran pengamanan informasi 4. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian 5. pengelolaan security operation center	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Diskominfo 2. Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bag Organisasi
5	050	PERENCANAAN				
	050	RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) , Musrenbang, Musrenbangpus RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Renstra (Rencana Strategi) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Bappeda Program Nasional RKP (Rencana Kerja Pemb.) RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Pemb. Daerah) Rencana Kerja Perangkat Daerah				
	050	KUA (Kebijakan Umum Anggaran) KUPA(Kebijakan Umum Perub. Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) Jawaban Gub. Atas PandanganFraksi Nota Keuangan RKT (Rencama Kerja Tahunan) RKO (Rencana Kerja Operasional) Laporan Laporan berkala Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
6	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN				
	060	Indeks Kepuasan Masyarakat Standard Pelayanan Inovasi Pelayanan Standard Prasarana Kerja Pegawai Akuntabilitas Kinerja Zona Integritas Reformasi Birokasi Budaya Kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Organisasi pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	061	Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	062	Organisasi Non Pemerintah				
	063	Organisasi Internasional				
	064	Organisasi semi pemerintah Lembaga Non Struktural				
	065	Ketatalaksanaan Tata Naskah Dinas Stempel dinas dan stempel jabatan, Nama instansi pemerintah/non pemerintah, Alamat-alamat kantor dan pejabat, Ketentuan pakaian dinas dan atribut				
	066	Tata hubungan kerja Telaah tata hubungan Penyusunan Bimbingan				
	067	Standar Rumah Tangga Operasional Prosedur Hari dan Jam Kerja Pegawai				
	068	Evalusai dan pelaporan ketatalaksanaan Pemantauan pelaksanaan System prosedur kerja Evaluasi pelaksanaan sistem Rekomendasi penyempurnaan sistem				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	069	Kelas Jabatan Analisis Jabatan Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan - Struktural dan Fungsional Uraian Jabatan Standar Kompetensi Teknis Standar Kompetensi Manajerial				
7	070	PENELITIAN				
	070	Pengembangan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) SINAS (Sistem Informasi Nasional)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kelitbangan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	070	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster Kab/Kota Desa Inkubator Teknologi dan Bisnis	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kelitbangan pada BAPPEDA 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	070	Pameran Produk Inovasi/Ristek BTC (Bisnis Teknologi Center) Raptex (Penerapan Iptek) HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual) Kajian Kajian Strategis/diskusi/FGD Seminar, Workshop	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Kelitbangan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	070	Kerjasama Penelitian Rapat Koordinasi/Rapat Teknis Lokakarya Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian Kerjasama Penelitian Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah Perguruan Tinggi/Swasta Lembaga Swasta Nasional, LSM Lembaga International Perekayasaan Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan) Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kelitbangan pada BAPPEDA 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	071	Penelitian dan Pengembangan Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai laporan riset	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kelitbangan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				hak akses.		
8	080	KONFERENSI				
	080	Bahan materi sambutan pidato Walikota, Wakil Walikota, Sekda Himpunan materi sambutan pidato Walikota, Wakil Walikota, Sekda Studi banding, Kunjungan kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat /BagianUmum/Bagian TU pada Perangkat Daerah, 2. Bagian humas dan protokol pada Asisten Administrasi Umum
	080	Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Kebijakan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pelayanan dan pembangunan dengan lembaga masyarakat, promosi dan informasi.	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan pada Asisten Administrasi Pemerintahan.
	081	Konferensi pers/rapat koordinasi Gubernur	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	082	Konferensi pers/rapat koordinasi Walikota				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	083	Konferensi pers/rapat koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan eselon lainnya		yang mempunyai hak akses.	Daerah	2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU, Bagian Humas dan Protokol pada Asisten Administrasi Umum
	084	Konferensi pers/rapat koordinasi instansi lainnya				
	085	Konferensi pers/rapat koordinasi internasional di dalam negeri				
	086	Konferensi pers/rapat koordinasi internasional di luar negeri				
9	090	PERJALANAN DINAS				
	090	perjalanan dinas (spt/st/sppd) meliputi: a. walikota, wakil walikota b. laporan perjalanan pegawai, sppd ke pusat, daerah dan luar daerah c. laporan hasil kegiatan peliputan kunker pejabat pusat ke pemerintah kota d. laporan hasil peliputan kegiatan kunker gubernur, wakil gubernur, sekda ke pemerintah kota. e. laporan perencanaan kegiatan kunker pejabat pusat ke daerah f. laporan perencanaan kegiatan kunker gubernur, wakil gubernur, sekda ke pemerintah kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pihak panitia penyambutan, protokoler penentu kebijakan, pengawas, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bagian Rumah Tangga SETDA, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Asisten Administrasi Umum

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	100	PEMERINTAHAN				
	130	PEMERINTAH KOTA Monografi, Tambahkan Kode Wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	131	Kepala Daerah, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan, dan sebagainya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	132	Wakil Kepala Daerah meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan, dan sebagainya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	133	Sekretaris Wilayah/Daerah meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan pada Asisten Administrasi Pemerintahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum		
	134	Badan-Badan Daerah, meliputi Badan Pertimbangan Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	135	Pembentukan Daerah meliputi, pembentukan daerah otonom, pembentukan wilayah, perubahan batas wilayah, pemekaran wilayah, permasalahan batas wilayah, pemindahan ibukota kabupaten / kotamadya, pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian OTDA pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian OTDA pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk	Memiliki dampak yang mengganggu	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	kinerja Perangkat Daerah	Bagian OTDA pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan meliputi Sambutan/ Pengarahan / Amanat, Pembentukan Kecamatan, Pemekaran Kecamatan, Perluasan / Perubahan batas wilayah Kecamatan, Pemindahan Ibukota Kecamatan, Laporan Kecamatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian OTDA pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	140	PEMERINTAHKELURAHAN APBD Kel Kewilayahan, Pemekaran, Pembentukan Desa/ Kelurahan, Permasalahan Batas wilayah / perluasan Desa/Kelurahan Permasalahan batas desa/ kelurahan Penyatuan desa / kelurahan Penghapusan Desa/Kelurahan RT – RW	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian OTDA pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	170	DPRD Pencalonan, pengambilan sumpah, keanggotaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD
	170	a. pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu b. alat kelengkapan dewan (pimpinan,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, komisi, panitia khusus) c. persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan dewan d. reses e. fraksi f. tata tertib dan kode etik g. hak h. peninjauan lapangan, kunjungan kerja, konsultasi i. keputusan dprd, peraturan dprd, keputusan pimpinan dprd		kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Daerah	
	170	perjalanan dinas (spt/st/sppd) meliputi : a. laporan hasil peliputan kegiatan kunker dprd kota/kabupaten ke dprd kota semarang b. laporan hasil peliputan kegiatan sidak, kunjungan lapangan dprd kota semarang c. laporan hasil peliputan kegiatan hearing pimpinan dprd kota semarang d. pengelolaan dokumentasi peliputan kegiatan dprd kota semarang	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas pada Sekretariat DPRD Kota Semarang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	180	HUKUM Kontitusi Dasar Negara Undang Undang Dasar Undang Undang Peraturan pemerintahan Perpres/Inpres Permen/inmen Tap MPR Konvensi Perdata Pidana				Kewenangan Pusat
		Perundangan tingkat provinsi meliputi perda, peraturan gubernur /intruksi gubernur Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Peraturan daerah,Peraturan bupati/Peraturan Walikota Perundangan Tingkat Desa Meliputi Peraturan Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Hukum dan SJDI Hukum Bagian Hukum pada Assisten Administrasi Pemerintahan
		Perundangan Tingkat Desa Meliputi Keputusan Kepala Desa	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Hukum pada Assisten Administrasi Pemerintahan
	180	Perundangan tingkat provinsi meliputi Kepgub Perundangan Tingkat Kab/Kota Meliputi KepBup/KepWal Keppres, Kepmen Peradilan Umum, Peradilan Negeri Tingkat Pertama	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Hukum dan SJDI Hukum Bagian Hukum pada Assisten Administrasi Pemerintahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Peradilan Tinggi, Mahkamah Agung				
	180	Peradilan Tata Usaha Negara	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Hukum pada Assisten Administrasi Pemerintahan
	180	Peradilan Agama Islam Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama Islam Mahkamah Islam Agung Mahkamah Militer Tingkat Pertama Mahkamah Militer Tinggi Mahkamah Militer Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Tata Usaha Negara Peradilan Tingkat Pidana Korupsi Peradilan Hak Asasi Manusia Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Ombustmen	Terbatas			Kewenangan Pusat
	180	Upaya Hukum Banding Kasasi Derden Verset	Terbatas			Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Peninjauan Kembali Grasi,Amnesti,Abolisi Eksekusi Pembinaan Hukum,meliputi Kadarkum Bantuan Hukum, meliputi LBH Hukum Internasional Imigrasi Visa Paspor Exit Reentry Lintas Batas/Batas Antar Negara Kependudukan Registrasi Narapidana Pembinaan Narapidana Pembebasan Narapidana				
	180	Tahanan titipan Kejaksaan Penuntutan Umum Penuntutan Khusus Hukum Adat	Terbatas			Kewenangan Pusat

C. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN POLITIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	200	POLITIK Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam Orde Baru Orde Reformasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Pemerintahan dan Bagian Otda pada Asisten Administrasi Pemerintahan
	201	Partai Politik Pendirian / pembetulan PARPOL AD/ART PARPOL Program Kerja, data kegiatan PARPOL Pembinaan PARPOL Hasil Munas/Musda PARPOL Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL Data Inventaris dan Keuangan PARPOL Partai/Organisasi Terlarang Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang Ijin Meninggalkan tempat/domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Pemerintahan dan Bagian Otda pada Asisten Administrasi Pemerintahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang				
	202	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai /organisasi terlarang Organisasi Kemasyarakatan Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja organisasi Munas / Musda Tk. I dan Tk. II Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi LSM Pembentukan organisasi Kepengurusan dan daftar anggota Organisasi Verifikasi dan rekomendasi hibah Ormas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
	210	Kepartaaian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
	220	Organisasi Kemasyarakatan Berdasar Perjuangan Berdasar Kekayaan Berdasar Kerohanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
	240	ORGANISASI PEMUDA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
	250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan sertapenegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi				
	260	ORGANISASI WANITA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
	260	Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH) Pencalonan Nomor Urut/Tanda Gambar Kampanye Dana Kampanye Petugas Pemilu Pemilih/Daftar Pemilih Sarana (TPS,Kendaraan,Surat Suara,Kotak Suara) Pemungutan Suara/Penghitungan Suara Hasil Pemilu Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif Penetapan pemenang pilkada	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Tata Pemerintahan pada Assisten Administrasi Pemerintahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	270	Verifikasi dan rekomendasi hibah KPU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol
	280	PENGAWASAN PEMILU/PILKADA Pemantauan Pelanggaran Sengketa Panwaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Tata Pemerintahan pada Assisten Administrasi Pemerintahan
	280	Verifikasi dan rekomendasi hibah Bawaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol

D. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM PEMERINTAH KOTA SEMARANG

300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan/ketertiban umum Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP (Tibum Tranmas), Bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) pada Satpol PP
300	Pengawasan Trantibum Penegakan Pelaksanaan Perda Pembinaan/ Penyuluhan pelanggaran Perda Patroli Wilayah Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing Pengamanan Pengawasan Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) dan Bidang Penegak Produk Hukum Daerah

						(Gakprokumda) pada Satpol PP
	310	PER TAHANAN Darat, Laut, Udara Ketahanan Bangsa Ketahanan Ekonomi Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat
	330	KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Huru-hara/Demonstrasi Senjata Api/Tajam Bahan Peledak Perjudian Surat-surat kaleng Pengaduan Masyarakat Himbauan atau Larangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) dan Bidang Penegak Produk Hukum Daerah (Gakprokumda) pada Satpol PP
	330	Bahan Laporan : - Data Eks Narapidana Teroris - Data Jaringan Intelijen - Data Penanganan Konflik/Penyelesaian Konflik Sosial yang masih berjalan - Laporan Rakor Pengamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Kesbangpol

330	<p>Hasil Pelaksanaan Monitoring Penanganan ideologi/faham lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Data Pengurus Anggota Organisasi Terlarang - Daftar Berkala tentang keadaan anggota Organisasi Terlarang <p>Laporan Umum (Kondisi, Jumlah Kekuatan) mengenai Organisasi Terlarang</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Pada Kesbangpol
330	<p>Bendel Rahasia Intelijen meliputi :</p> <p>Dokumen Faham Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Gafatar - Dokumen Persebaran HTI - Data Organisasi Terlarang/PKI - Data Napi teroris - Data Radikal Kanan - Data Jaringan Intelejen 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Pada Kesbangpol
340	<p>PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</p> <p>Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas</p> <p>Pembinaan dan Diklat</p> <p>Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas</p> <p>Pendidikan/latihan Linmas</p> <p>Pelatihan PAM Swakarsa</p> <p>Pendidikan/latihan MENWA</p> <p>Pengerahan dan pengendalian Linmas</p> <p>Kesejahteraan bagi anggota Linmas</p> <p>Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas</p> <p>Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas</p> <p>Santunan uang duka bagi anggota Linmas</p> <p>Penghargaan bagi anggota Linmas</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada Satpol PP

	340	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa Linmas Lanjut Usia Orientasi Kesadaran Bela Negara Kegiatan Pelaksanaan Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada Satpol PP
	350	<p>KEJAHATAN Makar/Pemberontakan/Terrorisme Pembunuhan Penganiayaan/Pencurian/Perampasan Subversi/Penyeludupan/Narkotika Penipuan dan Pemalsuan Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan</p> <p>Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan korban Kenakalan</p> <p>Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dll)</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas PPPA
			Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat , Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas PPPA
	360	BENCANA Pelatihan, Posko Bencana Surat Keputusan,Berita Acara, MOU, Koordinasi Gunung Merapi/Gempa/Tsunami Banjir/Tanah Longsor/Angin Topan Kebakaran/Kekeringan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penanganan Darurat pada BPBD . Dinas Kebakaran

		Kebakaran				
370	KECELAKAAN Latihan SAR Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam Pelatihan manajemen bagi pejabat Satkorlak dan Satlak PBD Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBD Latihan ketrampilan pemadam kebakaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kedaruratan dan Logistik; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD	
370	Kecelakaan Darat, Laut, Udara Investigasi/penyelidikan kecelakaan Asuransi Kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kedaruratan dan Logistik; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD	
380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Perencanaan Perencanaan teknis Rekomendasi Bantuan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kedaruratan dan Logistik; Bidang Pencegahan dan	

		Penanggulangan Bencana dengan pihak lain Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi PUSDALOPS Kunjungan lapangan Relawan Laporan Bencana				Kesiapsiagaan; Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD
390		Kerjasama BPBD dengan instansi lain Tengah dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Percepatan Perubahan Peraturan Permendagri/Peraturan Daerah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kedaruratan dan Logistik; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD
390		Berita Acara Hibah Peralatan BNPB Berita Acara Pinjam Pakai Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kedaruratan dan Logistik; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD
390		Rekomendasi Bantuan Peralatan Peralatan Rapat Koordinasi PBD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Logistik pada BPBD

	390	Kegiatan dari instansi luar BPBD terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan Surat Keputusan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, , Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada BPBD
--	-----	---	----------	--	--	--

E. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Kesra, Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2. Disdalduk
	410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Gotong-royong Swadaya gotong royong Pembinaan Pungutan Lembaga Sosial Desa (LSD) Latihan kerja masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penyuluhan Masyarakat Desa Kelembagaan Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Perekonomian Desa Pembiayaan Pembangunan Desa Inventarisasi Data	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU , Bagian Perekonomian , Bagian Tata Pemerintahan pada Setda 2. Disdalduk
	410	Petunjuk/Pembinaan/Pekembangan Pelaksanaan Pembangunan Bantuan/Stimulasi Perkreditan Desa Pelaporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Koperasi Desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU , Bagian Perekonomian , Bagian Tata Pemerintahan pada Setda 2. DPPPA, Disdalduk,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD) Sarana dan Prasarana Desa Pemukiman kembali penduduk Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa Perbaikan Kampung Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengembangan Desa Perlombaan Desa dan Kelurahan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga lainnya				Disnaker trans, Dinas Koperasi, Bappeda, Disperkim
	420	PENDIDIKAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dan sebagainya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Setda,Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, SD dan SMP pada Dinas Pendidikan 2. Badan Kesbangpol
	420	Ijazah, sertifikat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Setda,Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, SD dan SMP pada Dinas Pendidikan. 2. Dispora dan Bagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Kesejahteraan Rakyat Setda 3. Kantor Kemenag
	420	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat Daerah, Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2. Dispora Dan Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Kantor Kemenag
	420	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) Tahun Pelajaran Hari Libur Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata,widyawisata,lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains, Pelajar teladan, pertukaran Pelajar)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, SD dan SMP pada Dinas Pendidikan. 2. Dispora Dan Bagian Kesejahteraan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Rakyat Setda 3. Kantor kemenag
	420	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kurikulum Karya Tulis, Karya Ilmiah Ujian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, SD dan SMP pada Dinas Pendidikan. 2. Dispora Dan Bagian KesraSetda 3. Kantor kemenag
	420	Sarana Pendidikan(buku;perlengkapan pendidikan) Bangunan Pendidikan (Laboratorium; Perpustakaan) Gedung Sekolah Kampus Pusat Kegiatan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, SD dan SMP pada Dinas Pendidikan. 2. Dispora Dan Bagian KesraSetda 3. Kantor kemenag
	420	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi) Pertukaran Guru ke Luar Negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1 Sekretariat, Bidang Pembinaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Sertifikasi Guru		pengawasan serta penegak hukum	Daerah	GTK pada Dinas Pendidikan. 2 Dispora Dan Bagian KesraSetda 3 Kantor kemenag
	420	Sistem Informasi dan TIK pendidikan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, SD dan SMP pada Dinas Pendidikan. 2. Kantor kemenag
	426	KEOLAHRAGAAN Pembinaan Keolahragaan Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade) Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll) Olah Raga Rekreasi /Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional) Iptek dan Industri Olah Raga Sarana Prasarana Keolahragaan Kemitraan Olah Raga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	427	KEPEMUDAAN Pertukaran Pemuda Paskibraka Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : Gelandang remaja Kemitraan Pemuda Karang Taruna Kepramukaan/Kepanduan Organisasi Kepemudaan Karang Taruna	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Sosial
	430	KEBUDAYAAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan Pembinaan bidang kebudayaan Kesenian Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	430	Sarana Gedung Kesenian Padepokan Lembaga Adat Kegiatan adat/tradisi Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : festival, pentas seni Kepurbakalan Museum Peninggalan Kuno Candi, termasuk pemugaran Benda Sejarah Bahasa	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	430	Penghayat Kepercayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kesbangpol 2. Kantor Kemenag
	441	KESEHATAN Kebijakan dan Program Pembangunan kesehatan (Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan kesehatan, kesehatan masyarakat, SDK, Sekretaris) SOP Praktek Klinik Laporan Bulanan (PTRM/HIV AIDS/TB DOT)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Kesehatan 2. Sekretariat, Bidang pada RSUD
	441.3 441.6 442	Jiwa Perawatan Obat-obatan (penyimpanan dan pengawasannya) Pengadaan Obat Terlarang Kelamin, HIV, AIDS, IMS Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum) IGD; ICU IBS MCU (Medical Check Up) Farmasi Laboratorium Klinik, Patologi, Anatomi, Forensik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang SDK , Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, 2. Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Keperawatan,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Laboratorium pada RSUD
	440	Bank Darah Rumah Sakit Sanitasi Rumah Sakit CSSD/Laundry Kasus Hukum Rumah Sakit Tenaga Medis Perencanaan Tenaga Medis Perijinan untuk Tenaga Medis Standarisasi Penyimpanan Distribusi IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang SDK pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Umum, Instalasi CSSD pada RSUD
		Rekam Medis	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. 1. Bidang Penunjang, Instalasi Rekam Medik

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum		<p>pada RSUD/ 2. Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan</p>
	<p>441.1 441.2 441.8 441.91 442.3 443.24 443.21 443.230 443.31 443.37 443.4 443.41 443.42 443.44</p>	<p>Gigi Mata Kesehatan Ibu dan Anak JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan) JAMKESMAS JAMKESDA JAMPERSAL Jaminan lainnya Pemeriksaan obat Distribusi obat Obat Generik T.B.C Kusta Frambusia Kholera SARS, dan jenis penyakit lainnya Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B) Malaria Dengue Haemorrhagie Fever (DHF), DBD Filaria Serangga</p>	<p>Biasa /Terbuka</p>	<p>Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang SDK Dan Bidang Pencegahan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan, Bidang Penunjang, Bidang Keuangan, Bagian Umum, Bagian</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan pada RSUD
	443.45 443.36 443.6 443.61 443.62 443.63 443.64 443.65	Rabies Antrak Leptosirosis Chikungunya Penyakit lainnya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular A. Pektoris IMA (Irama Mastcmik Akut) HipeRumah Tanggaensi Stroke Diabetes Melitus Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks, Mammae, Hepar, Paru dan lainnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. 1.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakitpada Dinas Kesehatan 2. Kepala Instalasi 3. pada RSUD
	440 443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka) Imunisasi Surveilanse Pestisida Pencemaran Jamban Keluarga Kesehatan Institusi Higiene sanitasi Tempat-tempat makanan minuman Sarana air minum Pestisida, insektisida Pencemaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Ba gian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidng Pelayanan Kesehatanpad a Dinas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid Higiene sanitasiCA. Mammae Higiene sanitasi CA. Hepar Higiene sanitasiCA. Paru Kejadian Khusus Dekompensatiokordosis (serangan jantung) Asma Psikosis PPOM Kecelakaan Lalu Lintas Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi dan Pengawasan Makanan Kekurangan Makanan Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi busuk Keracunan makanan Menu makanan rakyat Gondok endemik (GAKI) Keperawatan Komite Medik Rawat Inap Rawat Jalan RSUD, RSJ, RS Khusus Studi Banding Rumah Sakit Penunjang Medis Radiologi				Kesehatan 2. Sekretariat, Bidang Pelayanan dan Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
	440	Gizi Mutu Rumah Sakit Akreditasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Promosi Layanan Kesehatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pendayagunaan Tenaga Medis Kegiatan Bakti Sosial Tenaga Medis TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia) Diklat Tenaga Kesehatan/Medis Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis Perlatan Kesehatan Perijinan berkaitan dengan Alat Kesehatan Pengobatan Alternatif Pijat Akupuntur		hukum		Kesehatan 2. Bidang Layanan RSUD
	440	SPI (Satuan Pengawas Internal) ISO PSBH (Problem Solving for Better Hospital) Jamu dan herbal Dukun Lembaga penyedia layanan kesehatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu,dsb Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit menular langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan Kesehatan,Pro mosi Kesehatan, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 2. Tim SPI dan Mutu,Tim ISO,Bidang Layanan Kesehatan pada RSUD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	440	RSU, RSJ, RS Khusus PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Kesehatan, Perijinan pada RSUD
	440	Perijinan untuk tenaga medis meliputi surat ijin praktek dan surat ijin kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Perijinan pada RSUD Kota Semarang
	450	AGAMA Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bantuan dibidang keagamaan Islam Peribadatan (Sholat, Zakat, Puasa, Haji/Umroh) Infaq. Shodaqoh Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau) Tokoh Agama Pendidikan Agama Pendidikan Tinggi Agama Menengah, MTs, MA Dasar, Pra Sekolah, MI Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll) Sarana pendidikan meliputi buku,gedung sekolah dll	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Kewenangan Pusat 2. BagianKesejahteraan Rakyat pada Setda 3. Kantor Kemenag
	450	Tenaga Pengajar Dakwah (Pengajian, MTQ) Wakaf Mazhab Agama Islam Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll) Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i) Kristen Protestan, Katholik (Peribadatan, Rumah Ibadah Gereja dll Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta,Domine dll) Mazhab, Organisasi Gerejani) Hindu, Budha dan Kong Hu Cu Peribadatan Rumah Ibadah(Pura, Candi, Vihara, Klenteng) Tokoh Agama, Rohaniawan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Kewenangan Pusat 2. BagianKesejahteraan Rakyat pada Setda 3. Kantor Kemenag 4. Bidang pada Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Mazhab, Organisasi Agama				
	460	SOSIAL Rehabilitasi Penyandang Cacat Cacat Ganda Cacat Fisik Cacat Mental/Eks Psikotik Rehabilitasi Sosial Pengemis, Gelandangan/Orang Terlantar(PGOT) Anak jalanan Tuna Susila Anak Nakal Tuna Wisma Lanjut usia	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial
	460	Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan pemerintahan.	Sekretariat, Bidang Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial
	460	Keperintisan dan Kepahlawanan Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya. Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan. Veteran Cacat Veteran Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	460	Taman Makam Pahlawan (TMP) Penyelenggaraan Undian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jateng
	460	Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat Sosial : Karang taruna Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Organisasi Sosial (Orsos) Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial
	460	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tenaga Pelopor Perdamaian Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial
	460	Masyarakat miskin : Rastra, BLT dll Masyarakat Miskin Pedesaan Masyarakat Miskin Perkotaan Pengelolaan Data Kemiskinan Sumbangan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas sosial
	460	Korban Bencana Jaminan Sosial Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dsb Panti Asuhan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat , Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bimbingan Sosial Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya PMI Makam Umum Pahlawan Khusus, Keluarga, Raja Krematorium				
	460	Kualitas Hidup Perempuan Perlindungan Perempuan Pengarutamaan Gender (PUG) Kejahatan Lainnya (Trafficking, hipnotis, dll) Kesejahteraan Anak Pengarutamaan Hak-hak Anak (PUHA) Perlindungan Anak Kesejahteraan Anak dan Keluarga	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kualitas Hidup, Bidang Perlindungan Perempuan, Bi dang pemenuhan Hak dan Perlindungan anak pada DPPPA 2. DISDALDUK
	460	Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pelaporan Penanganan Korban	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada DPPPA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						2.Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan Pendaftaran Penduduk Identitas Penduduk Biodata Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat,Bidang Fasilitasi Pelayanan Adminisitrasi dan kependudukan pada Discapil
	470	TRANSMIGRASI Penyiapan informasi daerah transmigrasi Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi Permasyarakatan/sosialisasi transmigrasi Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kerjasama di bidang transmigrasi Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik Pemukiman transmigrasi Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum /social dan jaringan transportasi Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi Tata ruang pemukiman transmigrasi Rancangan dan pemanfaatan areal tanah				
	470	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan Pengerahan Pendaftaran dan seleksi calon transmigran Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran Transmigran yang dinyatakan lulus				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		penyaringan				
	470	Rancangan kapling TSM Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah Pengukuran batas unit pemukiman Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah Sarana pemukiman transmigrasi Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan Pengerahan, pemindahan dan penempatan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans
	470	Pemberangkatan transmigran Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan Pengawasan perjalanan transmigran Pengaturan rute pemberangkatan Alokasi penempatan dan surat perintah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		pemberangkatan Penempatan Transmigran Kesiapan lokasi dandaya tampung Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti Penampungan transmigrasi (transito), pelatihan transmigran dan program/metode pengajaran Penyusunan silabus dan modul pelatihan Penyusunan calonpeserta/pelatih Penampungan transmigran di transito Pelayanan kesehatan bagi transmigran Pelayanan makanan bagi transmigran Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran Pembinaan masyarakat transmigrasi Identifikasi dan penjajagan pembinaan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan Pembinaan Pendidikan, Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>pengembangan pendidikan, Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status, Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat</p> <p>Pembinaan kesehatan</p> <p>Penyediaan sarana kesehatan dan KB</p> <p>Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa</p> <p>Pendistribusian bantuan pangan</p> <p>Pembinaan rohani</p>				
	470	<p>Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama</p> <p>Bimbingan adaptasi masyarakat</p> <p>Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial</p> <p>Pelayanan pos di daerah transmigrasi</p> <p>Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan</p> <p>Penilaian transmigran teladan</p> <p>Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha</p>	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans
	470	<p>KELUARGA BERENCANA</p> <p>Alat Kontrasepsi</p> <p>Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri</p> <p>Penyuluh Lapangan KB (PLKB)</p> <p>Pos KB desa, Akseptor KB</p>	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Keluarga Berencana pada DISDALDUK

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	480	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kominfo
	480	MEDIA MASSA Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok Perekonomian dan Perbankan Bidang lainnya Layanan Informasi/Leaflet Masukan Analisis Gubernur Televisi Film Dokumenter Kewartawanan/Jurnalistik Pembentukan Organisasi Profesi Kasus-kasus kewartawanan Penyalahgunaan Profesi Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers. Pers Tour Kunjungan Wartawan Asing Penyuluhan Masyarakat, Publikasi Lembaga Komunikasi Masyarakat, Lembaga Pemerintah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo. 2. Bagian Humas dan Protokol Setda

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan Training Fotografi, Training Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom				
	480	Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Radio Pengawasan Lembaga Penyiaran Kelompok Pemantau Isi Siaran Pengkajian Isi Siaran SDM Penyiaran Periklanan Ketentuan Pemasangan Reklame Pameran	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 2. Disperkim 3. Bapenda
	480	Pendirian Information Center Pembinaan Bidang Infokom Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah Wahana Komunikasi Masyarakat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Promosi Luar Negeri Kunjungan Wartawan Asing Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo. 2. Bagian Humas dan Protokol Setda

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Dialog Interaktif, Rubrik Materi /Pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif Pembuatan Kolom Khusus Hasil Pembangunan Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers Penyuluhan Masyarakat Publikasi Training Fotografi Training Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom Lembaga Komunikasi Masyarakat Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinaskominfo
	480	Rakor Pengendalian Kegiatan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada Diskominfo
	480	Pengelolaan website Pemerintah Kota Semarang	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Layanan E-Government pada Dinas Kominfo

F. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	500	PEREKONOMIAN				
	500.1	Dewan stabilisasi Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Sekretariat,Bidang pada Disperindustrian , Dinas Perdagangan. 2.Dinas Koperasi dan UKM 3.Bagian Perekonomian
	501	Pengadaan Pangan				
	502	Pengadaan Sandang				
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMTSP 2. Bagian Perekonomian Setda
	510	PERDAGANGAN	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Sekretariat , Bidang pada Dinas Perdagangan 2.Dinas Koperasi UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	<p>Tataniaga meliputi, Promosi perdagangan: promosi perdagangan, pekan raya, iklan, pameran, event-event, lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan), pasar, pertokoan</p> <p>Pelelangan, distribusi: pemasaran sembako, pemasaran hasil industri, penentuan harga pokok</p> <p>Bina usaha dan sarana perdagangan: rencana dan program kerja, pelaksanaan pelayanan administrasi, pelaksanaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Perijinan: penerbitan SIUP, perpanjangan, ijin prinsip, rekomendasi</p> <p>Perdagangan antar pulau: kerjasama bahan baku, industri pemasaran, kontrak</p> <p>Tera: tera ulang ukuran, takaran, timbangan, kalibrasi, cap tanda tera, biaya tera</p> <p>Bantuan peralatan: proposal, surat perijinan, serah terima</p> <p>Perijinan / rekomendasi tanda pabrik</p> <p>Kemetrologian: standart tingkat tiga, standart kerja satuan ukuran, ukuran metrologi</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat, Bidang Promosi pada Dinas, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM. 2. Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP 3. Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Peralatan: laboratorium metrologi, tanki ukur mobil, meter taxi, KWH meter, SPBU				
	511	Pemasaran: garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dan sebagainya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perdagangan pada Disperindag 2. Disperindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian 3. Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP
	512	Ekspor: hasil industri, ijin ekspor, pengembangan pasar luar negeri, manajemen perdagangan internasional	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan 2. Disperindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian 3. Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP
	513	Impor: ijin impor, standar mata dagang impor, manajemen perdagangan internasional, kegiatan impor, faktor-faktor pendukung, pengawasan mutu barang impor, penyaluran kegiatan impor, bahan konsumsi, bahan baku, bahan penolong, evaluasi dan pelaporan kegiatan impor				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	514	Perdagangan antar pulau: kerjasama bahan baku, aneka usaha perdagangan, industri pemasaran, kontrak	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	3. Sekretariat , Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan 4. Bagian Perekonomian
	515	Perdagangan luar negeri: kerjasama bahan baku, industri pemasaran, kontrak, pengembangan potensi perdagangan luar negeri, promosi dan informasi, kerjasama	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang pada Dinas Perdagangan 2. Bidang pada Dinas Perindustrian 3. Bagian Perekonomian
	516	Pergudangan: peti kemas, tangki penyimpanan termasuk tangki penyimpanan Peti Kemas Tangki Penyimpanan				
	517	Aneka usaha perdagangan				
	518	Koperasi: Bina Usaha Koperasi Koperasi Pertanian	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bidang pada Dinas Perdagangan , Bidang pada Dinas Perindustrian, dan Bidang pada Dinas Koperasi UKM 3. Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	518	Koperasi Non Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat, Bidang Produksi pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Dinas Koperasi UKM 3. Bagian Perekonomian
	518	Permodalan koperasi: Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha kecil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Permodalan Koperasi Pemupukan Modal Pemanfaatan Modal Perbankan dan Asuransi Permodalan Luar Koperasi Kredit Program Umum Kredit Program Khusus Distribusi dan Jasa Koperasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Restrukturisasi pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bidang pada Dinas Perindustrian, Bidang pada Dinas Pergadangan, Bagian Perekonomia 3. Bidang pada DPMPTSP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	518	Distribusi Bahan Pokok Distribusi Aneka Bahan Distribusi Kerjasama Niaga Jasa Angkutan Jasa Perumahan Aneka Jasa Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi Bina Lembaga Koperasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Usaha Dan Pemasaran pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bidang pada Dinas Perindustrian, Bidang pada Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian
	518	Organisasi Koperasi Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi Pemberian Badan Hukum Koperasi Penyelesaian Pembubaran Koperasi Keragaman Koperasi Pengakuan Koperasi Sekolah Amalgamasi Tertib Organisasi Koperasi Penyelesaian Penyelisihan/Persengketaan Bimbingan Kesadaran Hukum Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Hukum Setda, Bagian Perekonomian Setda.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	518	Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pengurus dan Badan Pemeriksa Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perekonomian
	518	Bina Tata Laksana Koperasi Klasifikasi Koperasi Pedesaan Klasifikasi Koperasi Perkotaan Klasifikasi Koperasi Sekunder Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi Administrasi Koperasi Pedesaan Administrasi Koperasi Perkotaan Karyawan/Manager Koperasi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Penyaluran Alat Sekolah Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD Akuntansi Akuntansi Koperasi Pedesaan/Perkotaan Akuntansi Koperasi Sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bidang pada Dinas Perdagangan, 3. Bidang pada Dinas Perindustrian 4. Bagian Perekonomian
	518	Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi Primer Pengawasan Koperasi Sekunder Koperasi Jasa Audit Pengawasan Usaha Pengawasan Usaha Mikro Pengawasan Usaha Kecil Pengawasan Usaha Menengah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengawasan pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	518	Kerjasama Kantor Akuntan Penyuluhan Koperasi Pembinaan Kader Koperasi Masyarakat Umum Forum Komunikasi Kelompok Tani Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penilaian Tingkat Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan Usaha Kecil Pembinaan Usaha Menengah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perekonomian
	520	PERTANIAN Tanaman Pangan Rencana dan Program Bimas/Inmas Termasuk Kredit Pelaporan dan Evaluasi Pertanian Produksi Padi Palawija Panen Gagal (Puso)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Pertanian 2. Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan,
	521	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Pertanian 2. Bidang pada Ketahanan Pangan,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	521	Sarana Usaha Pertanian Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya Pembenihan dan pembibitan Pupuk Irigasi Pertanian Rehabilitasi Lahan Pertanian Tanah Pertanian Pangan Persawahan Perladangan Kebun Pengusaha, Petani Lahan kritis Perlindungan Tanaman Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Penyakit Tanaman Pangan Hama tanaman pangan Pemberantas Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Pertanian 2. Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan
	520	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Dinas Pertanian. 2. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Dinas Perindustrian
	521	Pemasaran dan Promosi Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Perdagangan 5. Dinas Perindustrian
	522	KEHUTANAN Perencanaan Hutan Survey Survey PPA Survey Areal Survey Pembinaan Hutan Survey Potensi Hutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat dan bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2. Sekretariat dan bidang pada Dinas Pekerjaan Umum 3. Sekretariat dan bidang pada Bappeda

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	522	Tata Ruang Kawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Tata Ruang pada Distaru
	523	PERIKANAN Perumusan Kebijakan, Rencana, Program, Statistik, Prospek, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perikanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan bidang pada Dinas Perikanan
	523	Penyuluhan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Penangkapan Ikan	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Penyuluh, Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perikanan 2. Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	523	Produksi Perikanan (Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ijin usaha perikanan tangkap Penerbitan buku kapal perikanan, Pendaftaran kapal Teknologi Produksi Perikanan	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Dinas Perikanan 2. Sekretariat dan bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas PMPTSP
	523	Perjanjian Kerjasama Nelayan Andon dengan Profesi Lain Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas, Mediasi, Penyelesaian Konflik antar nelayan Penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Kelautan Perikanan Koperasi Kapal Pengawas Perikanan Penetapan Rencana sonasi, pengelolaan dan aksi pengelolaan pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil Pemberian Rekomendasi, Ijin Lokasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Sekretariat dan Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan 3. Sekretariat Daerah.
	523	Perikanan Budidaya : CBIB, CPIC Pelatihan Nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Dinas Perikanan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						n,Perikanan Dan Pertanian
	523	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Ekspor Hasil Perikanan Impor Hasil Perikanan Pemasaran Dalam Negeri Sarana Perikanan Rekomendasi ijin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Perbenihan Fasilitas perijinan: SIUP, SIPI, SKP Perbenihan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Permodalan dan Investasi Kelompok Pembudidaya Ikan Pengendalian hama dan penyakit Penyakit ikan Hama ikan Laboratorium Kesehatan Ikan	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Perindustrian 4. Bidang pada Dinas PMPTSP
	523	TPI/PPI	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Dinas Perikanan 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	523	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi dan Suaka Laut - Transplantasi bibit karang - Garam - Terumbu karang - Mangrove - Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - Harta karun di dalam laut - Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir - Pelestarian Hutan Kota - Penanganan Proklin (Program Kampung Iklim) - Pelestarian Sumber Mata Air - Pelestarian Tanaman Kehati (keanekaragaman Hayati) - Pemberdayaan Masyarakat terhadap Lingkungan (adipura dan Adiwiyata) - Kebersihan Kota dan Wilayah 	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang pada Dinas Kelautan 2. Bidang-Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup
	523	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sampah dan Limbah - Kualitas udara dan air 	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang pada Dinas Kelautan 2. Bidang-Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	523	Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kajian-Kajian Lingkungan Hidup	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang pada Dinas Kelautan 2. Bidang-Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup
	523	- KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP SRATEGIS (KLHS) : - KLHS RPJMD Kota Semarang 1\2016-2021 - KLHS RTRW. KLHS REVISI RTRWKota Semarang th 2011 – 2031 - KLHS RDTR Kecamatan Tugu th 2020	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DLH Kota Semarang
	524	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Perbibitan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan Budidaya Usaha Peternakan Pelayanan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pengembangan SDM dan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Pedagangan 4. Dinas Perindustrian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	524	Peternakan Kesehatan Hewan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Obat-obat Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Kelautan,Perikanan
	524	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Hygieni dan Sanitasi Produk Hewani Laboratorium Kesehatan Hewan Pengujian Mutu Asal Hewan Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan Inseminasi Buatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat dan BidangPeternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan
	524	Produksi Distribusi dan Pemasaran Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ternak Non Ruminansia Ternak Ruminansia	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian 2. Dinas Perindustrian 3. Dinas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Perdagangan. 4. Dinas Ketahanan Pangan
	525	PERKEBUNAN Kemitraan Kelompok Tani Usaha Perkebunan Program dan Pelaporan Monitoring Statistik Perkebunan Pembibitan / Benih Produksi Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan Pemasaran Hasil Perkebunan Perlindungan Tanaman H a m a Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan sertapenegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Hortikultura dan Perkebunan padaDinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan
	525	Alat dan Mesin Perkebunan Power Sprayer Hand Sprayer Polibag Alat Laboratorium Perkebunan Reagen Sarana/Alat Produksi Perkebunan Pengolahan lahan Terasering Pemasyarakatan Penyuluhan; Sosialisasi;Informasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Prasarana dan Sarana dan Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	526	KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan Kerawanan Pangan Sumberdaya Pangan Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Neraca bahan makanan Infrastruktur pangan sumber pangan Program Bimbingan Massal Pengembangan Sarana Sumber Daya Pembinaan Teknologi Sarana Produksi dan Permodalan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
	526	Agribisnis Mutu Hasil Pengelola Hasil Pangan Pemasaran Hasil Kementriaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan
	526	Distribusi Pangan & Cadangan Pangan Harga Pangan Neraca Pangan Teknisi Harga Pangan Sistem dan Pola Distribusi Sarana dan Prasarana Distribusi Pengadaan dan Cadangan Pangan Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Sistem Informasi Pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	526	Kelembagaan Keamanan Pangan Bimtek & Supervisi Kelembagaan Pangan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan Segar Bimtek & Supervisi Pengawasan Keamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.
	526	Promosi Penganekaragaman Pangan B2SA Pengembangan Pangan Lokal Inovasi Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Bimtek & Supervisi Pangan Lokal Analisis & Kajian Potensi Pangan Lokal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
	526	PENYULUHAN Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyelenggaraan Penyuluhan Sosialisasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang pada : 1. Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Kelautan 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. Disnakertrans 6. Disdalduk 7. BKPP
	526	PETANI GARAM Pembinaan / Pendidikan Masyarakat Pesisir	Terbatas	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Penyuluh, Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perikanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	530	PERINDUSTRIAN Industri Alat Transportasi Industri Logam Industri Mesin/Elektronik Industri Kimia/Farmasi Industri Tekstil Industri Makanan/Minuman	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan , Bidang Industri Kimia dan Tekstil pada Dinas Perindustrian.
	536	Aneka Industri/Perusahaan Industri Plastik dan Kaca Industri Kulit dan Imitasi Industri Aneka Bahan Bangunan Home Industri Aneka Kerajinan Pemasaran hasil industri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Aneka Aneka Industri pada Dinas Perindustrian.
	540	PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN Minyak dan Gas Bumi Pengusahaan Perijinan Rekomendasi Kontrak Karya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan sertapenegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang SDA dan Drainase pada Dinas PU 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP
	540	Pengolahan Penyaluran Tangki, Pompa, Tanker Energi Energi alternatif Gas Rawa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan BidangSDA dan Drainase pada Dinas PU 2. Sekretariat dan Bidang pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Biogas Energi baru terbarukan Perijinan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Pemetaan Energi Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)				DPMPTSP
	547	Pasca Tambang Reklamasi Penutupan Air tanah Cekungan Air Tanah(CAT):Pemetaan,Imbuhan,Lepasan Konservasi Pengendalian Daya Rusak Rekomendasi Teknis Sumur Artesis, Sumur Bor, Sumur Gali (Pasak) Pengusaha Pengebor (APATINDO) Sumur Pantau Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air Hidrologi Geologi Pemetaan Mitigasi Bencana Geologi Vulkanologi, Pengawasan Vulkanologi Panas Bumi Hidrogeologi Gerakan tanah (longsor, amblesan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang SDA dan Drainase pada Dinas PU.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawasan, pengendalian Hidrologi Kesamudraan Penghematan energi				
	545	Pertambangan, mineral dan batubara Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) WIUP Batuan WIUP Bukan Logam WIUP Logam WIUP Batubara Rekomendasi Teknis Perijinan IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi Khusus Ijin Usaha Jasa Pertambangan Pencabutan Ijin Pembinaan Pengawasan Pengawasan Usaha Pertambangan Penerbitan Kegiatan Pertambangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang SDA dan Drainase pada Dinas PU. 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP.
	550	PERHUBUNGAN				
	551	Perhubungan Darat: Angkutan Jalan Raya, sungai, danau, angkutan sungai, angkutan danau, feri, perkereta-apian Perizinan Trayek Terminal Alat Angkutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	551	Trayek Angkutan Dalam Trayek Angkutan Tidak Dalam Trayek Angkutan Penumpang Angkutan Barang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan. 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP.
	551	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur) Kecelakaan Lalu Lintas Uji Mutu Keselamatan, Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan Raya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan
	551.3	Sarana/Kapal Kecelakaan Perhubungan Laut Pelabuhan Laut Lalu Lintas Angkutan Laut Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Pelayaran Dalam Negeri Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Haji Pelayaran Charter/Wisata Turis Pelayaran Khusus Pelabuhan Alur Layar Terminal Penumpang/kontainer Terminal Keberangkatan Penumpang Terminal Kepulangan Penumpang Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus Pergerakan/Perawatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum		1. Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan. 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP. 3. Bidang Pengendalian dan Ketertiban pada Dinas Perhubungan.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Alur Pelayaran Kolam Pelabuhan Reklamasi Pantai Dumping Area Pekerjaan Bawah Air (Salvage) Penjagaan Pantai Penjagaan Pantai & Penganggulan Keselamatan di Laut (GAMAT) Patroli Bandar Patroli Perairan Sertifikat Awak Kapal Kecelakaan, Gangguan Kecelakaan Penumpang/Kapal Kecelakaan Barang Gangguan Sarana/Prasarana Pembijakan/Penyelundupan Pencemaran Perijinan Berlayar/Ijin Pembangunan/Ijin Usaha				
	551.3	Lalu Lintas Sungai dan Danau Perizinan Laut Perkapalan Alat Angkutan Angkutan Sungai Keselamatan, Rambu-rambu Alur dan Kolam Pelabuhan Trayek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan pada DinasPerhubungan. 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP. 3. Bidang Pengendalian dan Ketertiban pada Dinas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Perhubungan.
	551.6	Perkereta-apian Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie Prasarana (Jalan/Jembatan) Angkutan Penumpang (perkereta-apian) Angkutan Barang (perkereta-apian) Keselamatan (perkereta-apian) Kecelakaan (perkereta-apian) Perawatan/Perbaikan Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP.
	553.1	Perhubungan Udara Lalu Lintas Angkutan Udara Penerbangan Domestik Penerbangan Luar Negeri Penerbangan Haji Penerbangan Charter/Non Reguler Penerbangan Khusus/Jembatan Udara Pelabuhan/Bandar Udara Tanah/Lokasi Bandara Landasan Apron Terminal Penumpang Terminal Cargo Perlengkapan Parkir Kendaraan Alat Angkutan Udara Pesawat Udara Dermaga Muatan Dalam Negeri Muatan Luar Negeri EMPU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan. 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Sertifikasi Kelaikan Kelaikan Pesawat Udara Kelaikan Peralatan Penunjang Keselamatan Rambu-rambu Perakitan/Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Telekomunikasi Penerbangan Asuransi Asosiasi SATPAM Rally Udara/Lomba Perizinan Izin Terbang/Flight Approval Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan/EMPU Pembukaan Kantor Cabang Rekomendasi Ketinggian Bangunan Pembangunan Bandar Udara Khusus				
	554	POS Pembinaan Kebutuhan fasilitas Rehabilitasi/Perawatan Bina Usaha/Pengawasan/Penertiban Rumah Tangga Standarisasi Perangkat Tanah/Bangunan Filateli Asosiasi Laporan dan Evaluasi Pelayanan , Jasa Pos/Titipan/Giro				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	554.2	Benda Pos/Perangko Sampul Peringatan Jasa Pos Elektronik Perijinan Rekomendasi Usaha Jasa Pos/Titipan Pembukaan Agen/Cabang Gangguan Sarana dan Prasarana Kecelakaan Sabotase Penyeludupan				Kewenangan Pusat
	555	Teknologi Informasi Kebijakan Peralatan Telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pengembangan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo
	555.2	Internet/USO Telegram, Telex/SBB, Faximile Satelit, Stasiun Bumi Radio komunikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pengelolaan Infrastruktur pada Dinas Kominfo
	550	Sistem Pembinaan/Penertiban Perijinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Layanan E-Government pada Dinas Kominfo
	556	Pariwisata dan Rekreasi Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pariwisata	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	1. Sekretariat, Bidang Industri Pariwisata,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata Restoran dan Rumah Makan Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Usaha Sarana Pariwisata Ijin Pariwisata Ijin Usaha Pariwisata Ijin Usaha Jasa Pariwisata Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Ijin Usaha Sarana		mempunyai hak akses	Perangkat Daerah	pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP
	556.15	Wisatawan Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara Promosi dan Informasi Pariwisata Dalam Negeri Luar Negeri Perhotelan Status Hotel Kelas Hotel T a r i f Travel Service Pramu Wisata Biro Perjalanan/Angkutan Wisata Souvenir Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina) Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Ciptaan Tuhan Hasil Karya Manusia Rehabilitasi/Perawatan Pengembangan Fasilitas	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pemasaran, Bidang Kelembagaan Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPTSP.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Tanah/Bangunan				
	556.46	Bina Usaha Insitusi Asosiasi Lembaga Kepariwisataaan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kelembagaan Pariwisata pada Dinas Pariwisata 2. Sekretariat dan Bidang pada DPMPSTP
	557	Metereologi dan Hidrologi Data Debit Andalan Curah Hujan Klimatologi Hujan Buatan Peneropongan Bintang	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup
	560	TENAGA KERJA Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI Rekrutmen Calon TKI/TKW Seleksi Naker Ke Luar Negeri Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW Persyaratan Naker TKI/TKW Permohonan Rekomendasi PasspoRumah Tangga Perjanjian Kerja TKI/TKW KaRumah Tanggau Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat,Bidang -bidang pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri Pelatihan TKI/TKW				
	560.6	Pemberangkatan Naker Pemberangkatan Ke Luar Negeri Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri Berita Acara Serah Terima TKI/TKW	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat,Bidang -bidang pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	560.7	Pemulangan Naker Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis Pemulangan TKI/TKW Ilegal TKI/TKW Terkena Kasus Pidana Terdidik (TKMT) Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP) Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Lembaga Penyalur Naker Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN) Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK) Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat,Bidan g-bidang pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	569	Tenaga Kerja Orang Asing Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing Data Tenaga Kerja Asing Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing Pemulangan Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Ilegal	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang-bidang pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	570	MODAL DOMESTIK Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal) Pasar Uang dan Modal Saham	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada di Dinas PMPTSP
	580	PERBANKAN MONETER Kredit Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas Polis Premi Tertanggung/Pemegang Polis Uang Pertanggungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan pada Bagian Kredit Bank Jateng
	583	Investasi Tabungan Deposito Tabanas Taska Tapelpram	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan pada Bagian Pelayanan Bank Jateng

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bank Pembangunan Daerah Bank Jateng Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer		hukum		
	590	AGRARIA Tata Guna Tanah Pengurusan Hak-hak Tanah Guna Usaha Hak Guna Bangunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat
	590	Pemetaan dan Pengukuran Perpetaan Penyediaan Data, Peta dan Publikasi Fakta Tata Guna Tanah Tanah Kritis Landreform Redistribusi Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian Penentuan Tanah Obyek Landreform Pembagian Tanah Landreform Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform Ganti Rugi Ganti Rugi Tanah Kelebihan Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan Ganti Rugi Tanah Absentee	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	592.2	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee Ganti Rugi Tanah Partikelir Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir Bagi hasil Penetapan Imbangan Gadai Tanah				Kewenangan Pusat
	592.3	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Gadai Tanah Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah Pelaksanaan Gadai Tanah Sengketa Gadai Tanah Bimbingan dan Penyuluhan Pengembangan Yayasan Dana landreform (YDL) Pengurusan Hak-hak Tanah Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis Sewa Tanah Sewa Tanah untuk Tanaman teRumah Tanggaentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus Hak Milik Perorangan Badan Hukum Hak Pakai Perorangan Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Badan Hukum Badan Hukum Indonesia Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing Tanah Gedung-Gedung Negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Guna Usaha Perkebunan Besar Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Kehutanan Hak Guna Bangunan				
	593.3	Perorangan Badan Hukum P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda) Badan Hukum Asing Belanda–PBK No.5/56 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960) Hak Pengelolaan	Terbatas			Kewenangan Pusat
	595	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate Perusahaan daerah Pembangunan Perumahan Sengketa Tanah Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183) Pencabutan dan Pembebasan Tanah Pencabutan Hak Pembebasan Tanah Ganti Rugi Tanah Pendaftaran Tanah Pengukuran/Pemetaan	Terbatas			Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	595	Fotogrametri Terristris Triangulasi Peralatan Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960) Sertifikat Penjabat Pembuatan Akte Tanah Transmigrasi Tata Guna Tanah Landreform Pengurusan Hak-hak Tanah Pendaftaran Tanah	Terbatas			Kewenangan Pusat

G. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Perumusan Kebijakan Bidang KePUan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Evaluasi Laporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang- bidang pada Dinas PU
	603	Arsitektur Bahan bangunan Tanah dan batu Aspal Besi dan logam lainnya Besi beton Besi Profil (konstruksi) Paku	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidnag pada Dinas PU.
	604	Alumunium profil Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu) S e m e n Terhadap serangga Terhadap radiasi atom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidnag pada Dinas PU
	604	K a y u Bahan penutup Atap Alat-alat penggantung dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya I n s t a l a n s i	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidnag pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Instalansi bangunan Instalansi listrik Instalansi air/sanitasi Instalansi pengatur udara Instalansi akustik Instalansi cahaya/penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Terhadap gempa Terhadap angin/udara/panas Terhadap kegaduhan, Terhadap gas/explosive		hukum		
	610	P E N G A I R A N Irigasi Bendungan Waduk Bendungan Tanggul Menara pengambilan Pembangunan dermaga Bangunan pengambilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidnag pada Dinas PU
		Bendungan Bendungan dengan pintu bilas Bendungan dengan pompa Pelimpahan banjir Inventarisasi data pantai Laporan Kejadian Banjir Pengambilan bebas Pengambilan bebas dengan pompa Sumur dengan pompa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidnag pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	611.4	Kantung lumpur Silf ekstretor Escope chenel Bangunan pembawa Saluran Saluran induk Saluran sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidnag pada Dinas PU
	611.3	Suplesi Tersier Saluran kwarter Saluran pasangan Saluran tertutup / terowongan Bangunan Bangunan bagi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidnag pada Dinas PU
	611.3	Bangunan dan sadap Bangunan sadap Bangunan check Bangunan terjun Bax Tersier Got miring Talang Syphon Gorong-gorong Pelimpahan samping Bangunan Pembuangan Saluran Saluran Pembuangan induk Saluran Pembuangan sekunder Saluran Pembuangan tersier Bangunan Bangunan out let Bangunan terjun	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan penahan banjir Gorong-gorong pembuangan Talang pembuang Syphon pembuangan Bangunan lainnya Jalan Jalan Inspeksi				
	611.5	Jalan Logistik Jembatan Jembatan inspeksi Jempatan Hewan Tangga cuci Kubangan kerbau Waduk lapangan Bangunan penunjang Jaringan telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU
	613	Stasiun Argo Bangunan TPI dan pasar ikan P o l d e r Tanggul keliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan pembawa Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Saluran stasiun pompa pemasukan Bangunan bagi : Gorong-gorong Syphon Bangunan pembuangan Stasiun pompa pembuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pintu Air Pembuangan Gorong-gorong pembuangan Syphon pembuangan Bangunan Pengukur Air Bangunan Pengukur Curah Hujan Bangunan Gudang Stasiun Pompa Bangunan Listrik Stasiun Pompa Rumah Petugas Eksploitasi Pasang surut Saluran Pembawa Tersier Saluran Penyimpanan Air Saluran Pintu Pembuangan Bangunan pembuangan Saluran Pintu Pembuangan Bangunan lainnya				
	615	Kolom pasang Saluran Saluran Lalu Lintas Saluran Muka Bangunan Bangunan Penangkis Kotoran Bangunan Pengukur Muka air Pengendalian sungai Bangunan pengaman Tanggul banjir Pintu Pengatur Banjir Klep Pengatur Banjir Tembok pengaman Talut K r i b Kantung Lumpur Check Dam Syphon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Saluran pengaman Saluran banjir Saluran Drainage Corepure Bangunan lainnya Warning System Stasiun, Stasiun Pompa Stasiun pengukur Curah Hujan Stasiun Pengukur Air Stasiun Pengukur Cuaca Stasiun Pos Penjagaan Pengaman Pantai Tanggul K r i b Bangunan lainnya Air Permukaan (Danau,Waduk, Sungai)				
	620	J A L A N Jalan Kota Jalan Provinsi Daerah Penguasaan T a n a h	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU
	621.2	Bangunan Bangunan sementara Jalan Sementara Kantor proyek Gedung proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan R u m a h	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	621.3	Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan Lapisan Pondasi bawah Lapisan Pondasi Lapisan Permukaan Drainage Parit Tanah Gorong-gorong (culvert) Buku Trotoir Tanah Perkerasan Pasangan M e d i a n T a n a h Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah sampingan Tanaman Pagar Bangunan Pelengkap dan Pengaman Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengaturan lalu Lintas Patok-patok KM Patok-patok R.O.W. (Sempadan) Rel Pengamanan P a g a r Turap Penahan Bronjong	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	622	Jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara Kantor/Gedung Proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU
	620 620	Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan jalan Pekerjaan tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan (pavement) Lapis pondasi bawah Lapis pondasi Lapis permukaan Drainage Parit Gorong-gorong (culvert) Buku trotoir Tanah Perkerasan Trotoir Tanah Perkerasan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan Rambu-rambu Lampu penerangan Lampu Pengatur lalu lintas Patok-patok KM				
	620	Patok-patok R,O,W (sempadan) Rel pengamanan Pagar Turap penahan Bronjong Daerah penguasaan Badan jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU
	622.4	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan) Drainase (gorong-gorong, parit) Median Daerah samping (pagar, tanaman) Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU
	630	JEMBATAN Jembatan pada jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Piloon				
	631.5	Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoar Sandaran Talang air	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU
	631.7	Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median Jembatan pada jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah				
	632.3	Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Landasan Bangunan Gelagar Lantai	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Perkerasan Jalan orang/trotoir Sandaran Talang air Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lau lintas Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median Jembatan pada jalan Nasional Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan) Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek) Pondasi Bangunan bawah Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan) Bangunan pengamanan (bronjong strek dam, krib)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan pelengkap dan pengamanan				
	640	BANGUNAN Bangunan Pemerintah: Gedung Pengadilan,Rumah Pejabat Negara,Gedung DPR,Gedung Balai Kota, Penjara, Perkantoran Bangunan Pendidikan: Taman Kanak-kanak, SD & Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi Bangunan Rekreasi Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian, Gedung Pemancar Bangunan Perdagangan: Pusat Perbelanjaan, Gedung Perdagangan Perkantoran Bangunan Pelayanan Umum: Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum Gedung parkir Rumah sakit Gedung telkom Terminal Angkutan Umum/Angkutan Air/Angkutan Darat Bangunan Keagamaan,Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi Kraton Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan Tempat Tinggal Rumah Perkantoran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	648.2	Rumah Pedesaan Rumah contoh Real estate Elemen Bangunan Pondasi Diatas tiang Dinding Penahan beban Tidak menahan beban A t a p Lantai/langit-langit Suspendend Solit Pintu/jendela, Pintu hermonik, Pintu biasa, Pintu sorong Jendela kayu, Jendela sorong, Jendela vertikal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU 2. Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perumahan dan Permukiman
	640	FASILITAS PENGADAAN TANAH Perumusan Perencanaan Teknis Pengoordinasian Fasilitas Pengadaan Tanah Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah, Penetapan Lokasi, Ganti Rugi dan Santunan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Aset Daerah sampai dengan sertifikatnya Penetapan Obyek/Subyek Redistribusi Tanah, Serta ganti kerugian Tanah dan Absente lintas Daerah Kab/Kota. Fasilitasi administrasi Pertanahan Penetapan tanah ulayat lokasinya lintas daerah Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU 2. Sekretariat dan Bidang pada Bappeda 3. Bidang Aset Daerah Pada BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan Bahan Pengoordinasian Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Penyediaan Rumah Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Kab/Kota Fasilitasi Penyelesaian Sengketa tanah garapan lintas daerah Kab/Kota Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santuanan tanah untuk pembangunan. Inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kab/kota. Penyelesaian masalah tanah lintas daerah. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU 2. Sekretariat dan Bidang pada Bappeda 3. Bidang Aset Daerah Pada BPKAD 4. Sekretariat dan bidang-bidang pada Disperkim
	640	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN Perumusan Kebijakan Teknis. Menyiapkan bahan pengoordinasian. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kab/kota. Pemberian ijin lokasi. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas PU 2. Sekretariat dan Bidang pada Bappeda 3. Bidang Aset Daerah Pada BPKAD 4. Sekretariat dan bidang-bidang pada Disperkim
	640	PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat dan Bidang-

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan Perencanaan Perumahan Pembangunan Perumahan Pelayanan data Teknis / Konstruksi Perumahan		kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	kinerja Perangkat Daerah	bidang pada Disperkim
	640	PERUMAHAN UMUM Perumusan Kebijakan Teknis Penyediaan Prasarana sarana Utylitas Umum Rumah Korban Bencana Daerah Fasilitasi Penyediaan Rumah Penyediaan Rumah Susun Khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rumah Tapak Sederhana sehat bagi Masyarakat Berpernghasilan Rendah. Pelaporan di bidang Perumahan Umum.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Disperkim 2. Sekretariat dan Bidang pada Bappeda
	640	PERUMAHAN SWADAYA Kebijakan Teknis di Bidng Perumahan Swadaya. Pengoordinasian di Bidang Perumahan Swadaya. Pengembangan Perumahan Swadaya. Fasilitasi dan Stimulan. Pembangunan, Pemanfaatan Rumah bagi Rumah Tangga Miskin.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan Dan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Penyiapan Bahan Pengoordinasian. Perencanaan Petunjuk Teknis. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Prasarana dan Sarana Utylitas Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
	640	PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTILITY KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Menyiapkan Bahan Pengoordinasian. Pengkajian Prasarana Sarana Utylitas. Penyusunan dan Pengembangan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
	640	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Pengoordinasian. Bimbingan Teknis dan Supervisi. Pengkajian dan Penyusunan Inovasi. Fasilitasi Peningkatan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
	640	PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN. Perumusan Kebijakan teknis. Penyiapan Bahan Pengoordinasian.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang RURS pada Dinas Perumahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penyusunan Data Base. Pengelolaan Data. Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Pemanfaatan Rumah bagi Korban Bencana Alam. Pemeliharaan Prasarana Sarana Uilityas Perumahan Swadaya. Pemberdayaan dan Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.		hukum		Dan Permukiman
	650	TATA RUANG KOTA Daerah perdagangan/pelabuhan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkantoran Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan (site & servei) Kepadatan Rendah (low density) Kepadatan Tinggi (high density) Daerah Industri Daerah Rekreasi (open source) Publik Garden Sport& playing fields Open space Transportasi (tata letak) Jaringan jalan Jaringan kereta api	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Tata Ruang pada Distaru

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	657	Jaringan sungai Assineering Saluran Pengumpulan Instansi Pengolahan Bangunan Bangunan Penyaring Bangunan Penghancur Kotoran Bangunan Pengendapan Bangunan Pengering Lumpur Unit Disinfektan Unit Perpompaan Kesehatan Lingkungan Persampahan Bangunan pengumpulan Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air Buangan Industri Kegaduhan Kebersihan kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase pada Dinas PU 2. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda
	660	TATA LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kebersihan Lingkungan Pencemaran Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran Tanah Pencemaran Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kerusakan lingkungan Konservasi Pesisir Dan Laut	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang SDA dan Drainase pada Dinas PU 2. Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Konservasi Sumber Daya Alam				
		Pentaatan Hukum Lingkungan Laboratorium Lingkungan Air, Udara, Tanah Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Teknologi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Pengamanan Lingkungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang SDA dan Drainase pada Dinas PU 2. Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup
	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang tata Ruang pada Distaru

H. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	700	PENGAWASAN LHP bidang Kearsipan dan Perpustakaan LHP terkait inventarisasi asset LHP terkait bidang Perhubungan LHP terkait bidang Komunikasi, Informasi, dan Teknologi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	710	BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah,	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	720	BIDANG POLITIK Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bidang Politik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN Pengawasan Kesbangpolinmas Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badang Kesbangpol 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT LHP Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	750	BIDANG PEREKONOMIAN LHP Bidang Perekonomian	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM LHP Bidang Pekerjaan Umum	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						masing Perangkat Daerah
	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK LHP terkait Penyimpangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah
	780	BIDANG KEPEGAWAIAN LHP Bidang Kepegawaian LHP terkait Penyimpangan Pejabat / PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	790	BIDANG KEUANGAN LHP terkait Bidang Keuangan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan bidang pada Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah

I. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	800	Kebijakan kepegawaian, meliputi : a. perencanaan b. penelitian	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai pada BKPP
		c. statistik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Administrasidan Kepegawaian pada BKPP
		d. peraturan perundang-undangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Administrasi dan Kepegawaian Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	810	Pengadaan Pegawai, meliputi : a. pendaftaran cpns (testing, screening, pengumuman tes dan pemanggilan, pengujian kesehatan, pengangkatan cpns golongan I-III) b. pendaftaran tenaga kontrak kerja/mitra kerja	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bagian Umum, Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP
	820	Mutasi, meliputi : a. pengangkatan cpns b. pengangkatan pns golongan I-III	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Administrasi Kepegawaian, , Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP
	821	c. pengangkatan dan pembebasan dalam jabatan struktural eselon I-IV	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang AdministrasiKepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP
	821	d. pengangkatan dan pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Administrasi Kepegawaia 2. Sekretariat / Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Perangkat Daerah
	822	e. kenaikan gaji berkala golongan I-IV	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Informasi Data Kepegawaian pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	820	f. kenaikan pangkat golongan I-IV g. pemindahan/pelimpahan/pembantuan golongan I-IV h. lolos butuh i. data sering dan penempatan kembali j. wajib militer	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP
	830	Kedudukan, meliputi : a. peninjauan masa kerja	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. penyesuaian pangkat/gaji golongan I-IV	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP
		c. penghargaan ijasah (pencantuman gelar)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Adminstrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP
	840	Kesejahteraan Pegawai, meliputi : a. tunjangan (struktural/fungsional) b. kehormatan c. tambahan penghasilan d. taspen, askes, BPJS, bantuan pendidikan, perumahan e. surat dispensasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kesejahteran dan Disiplin Pegawai pada BKPP
	850	Cuti, meliputi : a. tahunan b. besar c. sakit d. bersalin e. alasan penting f. di luar tanggungan negara	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah
	860	Penilaian, meliputi : a. penghargaan (satyalencana karya satya, kenaikan pangkat anumerta, hadiah kenaikan pangkat, pegawai teladan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai pada BKPP
	860	b. hukuman (ringan, sedang, berat)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai pada BKPP 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	860	c. konduite/DP3	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, , terkait data pribadi	1. Bidang Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	860	d. ujian dinas tingkat I dan III	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada BKPP
	860	e. penilaian kinerja (struktural dan fungsional)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	860	f. rehabilitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai pada BKPP
	870	Tata Usaha Kepegawaian, meliputi: a. formasi pegawai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	870	b. bezetting/daftar urut kepegawaian c. duk non pns tidak tetap/ blud	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada BKD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing pada Perangkat Daerah
	870	d. sistem informasi kepegawaian (nip, karpeg, tanda pengenal, daftar keluarga, karsu/karis, daftar riwayat pekerjaan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Administrasi Kepegawaian pada BKPP 2. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	870	e. kewenangan administrasi kewenangan (pelimpahan wewenang, spesimen tanda tangan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				hak akses		
	870	f. KORPRI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Disiplin pada BKPP 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	880	Pemberhentian, meliputi : a. permintaan sendiri termasuk pengunduran diri dengan hak pensiun golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Administrasi Kepegawaian pada BKPP; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	880	b. pensiun (janda/duda, yatim piatu)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Administrasi Kepegawaian pada BKPP; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	880	c. karena meninggal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Administrasi Kepegawaian pada BKPP; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	880	d. alasan lain, keuzuran jasmani	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Administrasi Kepegawaian pada BKPP
	880	e. tidak dengan hormat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai pada BKPP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	880	f. pembekalan pns yang akan purna dan tali asih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada BKPP;
	880	g. pemberhentian pegawai Non PNS tidak tetap/BLUD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	890	Pendidikan Pegawai (Tata Usaha) : a. perencanaan program pelatihan b. sarana Pendidikan c. jenis diklat dan Pelaporan diklat d. pengembangan kompetensi pegawai e. tugas belajar (ijin belajar, tunjangan, bantuan pendidikan, penempatan kembali) f. tenaga pengajar/ narasumber g. jurnal ilmiah h. penelitian i. magang j. short course/ in house training k. evaluasi pasca diklat dan evaluasi narasumber	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKP P 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	890	sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu: a. sertifikasi kompetensi b. pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengajar c. pengendalian mutu diklat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d.kerjasama penyelenggaraan diklat e.karya tulis/ lokakarya f .kurikulum, silabi dan modul g.metode pembelajaran(kuliah,ceramah,simposium ,diskusi kuliah lapangan,kurikulum,karya tulis)				BPSDMD, UPTB Pengelolaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada BKPP
	890	pengembangan kompetensi teknis : a.pengembangan kompetensi /diklat teknis umum b.pengembangan kompetensi /teknis inti c.pengembangan kompetensi/ teknis pilihan d.praktek lapangan/observasi lapangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada BPSDMD , UPTB Pengelolaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada BKPP
	890	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional : a.pengembangan kompetensi /diklat pembentukan jabatan fungsional b.pengembangan kompetensi / diklat penjurangan jabatan fungsional c.pengembangan kompetensi/ diklat teknis jabatan fungsional d. praktek Lapangan/Observasi Lapangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional pada BPSDMD,UPTB Pengelolaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPP
	890	Pengembangan Kompetensi Managerial :	Biasa/Terbuka	Pengguna dari	Tidak memiliki	Bidang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a.pendidikan dan pelatihan kepemimpinan b.pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah c.pendidikan dasar bagi cpns d.visitasi/benchmarking e inovasi kepemimpinan.		eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Pengembangan Pegawai, UPTB Pengelolaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada BKPP

J. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	900	Keuangan meliputi a. nota keuangan b. APBN c. APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran pada BPKAD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	910	Anggaran, meliputi : a. keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan opd/ppkd, pemimpin dan pejabat keuangan, pejabat teknis blud b. dpa/dppa/dpal-opd/ppkd c. anggaran kas d. surat penyediaan dana (SPD)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan pada BPKAD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	920	Akuntansi yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi pada BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	930	Perbendaharaan meliputi surat perintah pencairan dana (SP2D), surat penolakan penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Kas pada BPKAD
	940	Pembinaan kebendaharaan yaitu bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	950	Pengelolaan kas daerah meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. laporan pemotongan IWP, taperum, pph 21 dari gaji b. laporan rekapitulasi penerimaan daerah c. daftar pemotongan dan penyetoran pajak (PPn/PPh) dari CV/PT/instansi d. surat tanda setoran (STS) e. laporan realisasi daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran f. rekonsiliasi meliputi surat penerimaan, laporan bank 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha di masing-masing Perangkat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						at Daerah
	950	g. laporan mutasi penempatan deposito h. surat perintah transfer uang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	960	Evaluasi dan Pengendalian meliputi Tuntutan (ganti rugi dan perbendaharaan), Evaluasi dan perubahan APBD Kab/Kota serta pertanggungjawaban APBD Kab/Kota, Edaran keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran, Bidang Aset Daerah, Bidang Perbendaharaan Dan Bidang Akuntansi pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Perangkat Daerah
	960	Penjualan kendaraan dinas melalui lelang	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Aset Daerah pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	961	Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspektorat dan BPK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat/ Bidang Anggaran, Bidang Aset Daerah. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						masing Perangkat Daerah
	970	<p>PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak PBB, BPHTB</p> <p>Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet.</p>	Biasa	Pengguna dari internal dan eksternal dengan melakukan pengajuan untuk hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendapatan Bukan Pajak pada Bapenda 2. Bidang pajak I dan Bidang Pajak II pada Bapenda
	970	<p>Retribusi bidang kesehatan, bidang seni budaya dan pariwisata, bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar) Retribusi bidang pertaniandan peternakan (termasuk pemotongan hewan) Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan,telekomunikasi, parkir dll)</p>	Biasa	Pengguna dari internal dan eksternal dengan melakukan pengajuan untuk hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pendapatan Bukan Pajak
	970	<p>Retribusi bidang perikanan dan kelautan Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)</p>	Biasa	Pengguna dari internal dan eksternal dengan melakukan pengajuan untuk hak	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pendapatan Bukan Pajak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				akses		
	970	Pengolahan data pendapatan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) Pengembangan system informasi pendapatan Pengembangan Potensi dan Pengembanan Pendapatan	Biasa	Pengguna dari internal dan eksternal dengan melakukan pengajuan untuk hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembukaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah pada Bapenda
	970	Pengolahan data pendapatan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) Pengembangan sistem informasi pendapatan Pengembangan potensi dan pengembangan pendapatan)	Biasa	Pengguna dari internal dan eksternal dengan melakukan pengajuan untuk hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004